

## **Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

**Tri Shakti Wiguna<sup>1</sup> Tina Kartini<sup>2</sup> Risma Nurmilah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi

*trishaktiwigunaaa@gmail.com<sup>1</sup>, tinakartini386@ummi.ac.id<sup>2</sup>, risma@ummi.ac.id<sup>3</sup>*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the transparency and accountability of the management of the School Operational Assistance Fund (BOS) at SDN Margabakti. This research used a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations and documentation. The results showed that transparency in the management of BOS funds at SDN Margabakti has been implemented, especially in financial planning and reporting. However, there are several obstacles that hinder the optimal implementation of transparency, such as limited community involvement and limited publication of information. In addition, accountability in the management of BOS funds still needs to be improved, especially in terms of internal audits and the submission of reports to relevant parties. Thus, further efforts are needed to improve transparency and accountability in the management of BOS funds so that they are in accordance with the principles of good governance.*

**Keywords :** Transparency, Accountability, BOS Fund Management.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Margabakti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SDN Margabakti sudah diterapkan, terutama dalam perencanaan dan pelaporan keuangan. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan transparansi secara optimal, seperti keterbatasan keterlibatan masyarakat dan publikasi informasi yang terbatas. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan dana BOS masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal audit internal dan penyampaian laporan kepada pihak-pihak terkait. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

**Kata kunci :** Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana BOS.

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar untuk membangun sumber daya manusia, pendidikan yang bermutu akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif untuk mewujudkan hal tersebut maka dapat menciptakan generasi yang unggul dan kompetitif, serta dapat menciptakan manusia yang berkualitas, sehingga mampu bersaing dimasa depan (Damayanti, 2022). Namun saat ini sekolah menjadi hal yang sulit bagi masyarakat untuk belajar, terutama bagi mereka yang tidak mampu dan berpenghasilan rendah (Dinata et al., 2023).

Pada pembukaan UUD 1945 tertuang bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar bahwa serta negara berkewajiban untuk

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan hak warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 menyatakan (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) (UUD, 1945).

Munculnya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai kompensasi bidang pendidikan untuk mendukung program wajib belajar. BOS adalah kebijakan pemerintah yang, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses ke pendidikan dilaksanakan melalui program ini BOS ini. (Intan & Zulkarnain, 2023). Program BOS menjadi program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan masyarakat luas (Brutu, 2022). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Dinata et al., 2023). BOS merupakan hak setiap siswa yang disalurkan melalui sekolah untuk mendanai biaya operasional kegiatan belajar mengajar. Dan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu serta ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah (Liniarti & Nasution, 2022).

Pengelolaan dana BOS merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan perencanaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Sekolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2015 pasal 2 bagian (a) menyatakan bahwa penggunaan dana BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun secara efektif dan efisien, serta bagian (b) menyatakan pertanggung jawaban keuangan dana BOS dilaksanakan sesuai dengan dan berdasarkan tertib administrasi transparansi, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan dalam keuangan dana BOS. Melalui pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, maka masyarakat akan mengetahui untuk apa saja dana tersebut digunakan dan dibelanjakan, dengan demikian pihak sekolah dapat mempertanggungjawabkan atas dana yang di berikan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan (Krina, 2017).

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan menjadi acuan penjaminan mutu untuk komponen sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan tersebut salah satunya adalah tentang standar pembiayaan yang menyangkut Transparansi dan Akuntabilitas. Namun pada kenyataanya, saat ini masih belum semua lembaga pendidikan menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam penyelesaian tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercahan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah (Damayanti, 2022).

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2018).

Perspektif transparansi mewajibkan segala bentuk pengelolaan keuangan bersifat terbuka atau transparan. Laporan keuangan yang transparan menandakan bahwa pengelolaan dana sekolah dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Dana sekolah merupakan tanggung jawab sekolah dalam mengelolanya tetapi dengan prinsip transparansi dapat mengetahui apa yang telah dilakukan sekolah dengan dana tersebut dan manfaat yang dirasakan. (Waluyo, 2017). Terlaksananya transparansi, maka pengelolaan dana menjadi terkontrol (Nodera et al., 2023).

Sekolah harus mengupayakan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Semua publik dan pihak yang terkait akan mendapatkan manfaat dari penerapan prinsip-prinsip tersebut. Akibatnya, Sekolah dianggap bersih dan berwibawa oleh publik dan pihak yang terkait. Ini berarti bahwa sekolah memberikan informasi dan menjamin bahwa orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan memadai. (Wahinun et al., 2019). Oleh karena itu, penggunaan dan pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan hati-hati, jujur, dan penuh tanggung jawab, dan laporan penggunaan dana harus diberikan tepat waktu. Selain itu, evaluasi rutin harus dilakukan dan tim BOS harus dibentuk untuk menilai penggunaan dana. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembelanjaan tidak menyimpang dari Juknis BOS tahun tersebut. (Waluyo et al., 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa 3.600 orang tua siswa dari 720 sekolah disebut tanah air, hasilnya adalah 71,61 persen orang tua tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65 persen tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. Selain itu, 89,58 persen orang tua tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS dan memberikan saran kepada sekolah. Tidak hanya itu saja, seperti yang dituliskan dalam (harian Merdeka.com:2013) Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Komunitas orang tua siswa, menyatakan 87 persen sekolah tidak transparan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jumlah tersebut merupakan hasil uji akses yang dilakukan terhadap 222 sekolah sample di delapan provinsi. (Hasdiana, 2018) Berdasarkan hasil observasi peneliti di SDN Margabakti prinsip pengelolaan dana BOS yang berdasarkan pada sifat transparansi dan akuntabilitas belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian dan keterlibatan

seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Berhubungan dengan kendala dan kekurangan dalam pengelolaan dana tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN Margabakti.

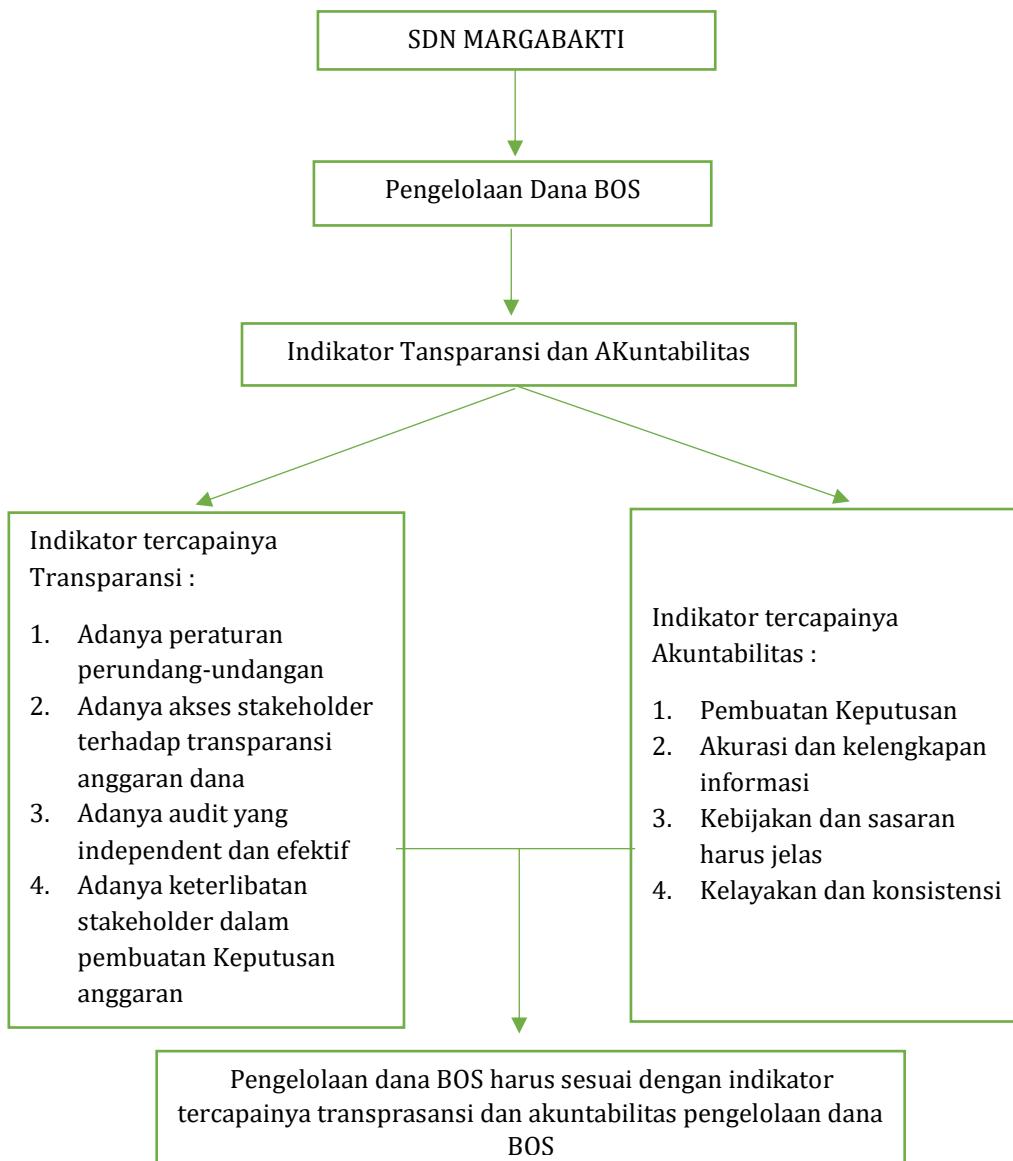
## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Transparansi**

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, bersifat bebas, jelas dan terbuka. Istilah Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua orang yang terkait di dalamnya terhadap kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. (Maros & Juniar, 2016).

### **Akuntabilitas**

Menurut Teguh (2008:2) bahwa : “Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat”.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang menekankan pada deskripsi dan interpretasi fenomena sosial tanpa mengubah variabel yang diteliti. Pada penelitian ini terdapat tiga situasi sosial Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite (*Actors*), SDN Margabakti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi (*Place*), dan Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (*Activity*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis data sebelum di lapangan dan analisis data di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS**

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi mengenai keterbukaan dalam pengeolaan keuangan dana BOS, merupakan salah satu prinsip yang harus diakukan oleh pihak sekolah dalam menjalankan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan prinsip kedilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public. Transparansi dalam pengelolaan keuangan di sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan orang tua siswa, Masyarakat dan pemerintah.

Menurut Nico (2007:21-22) indikator pencapaian transparansi pada lembaga pendidikan (sekolah) yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan transparansi, adanya akses stakeholder terhadap transparansi anggaran dana, adanya audit yang independent dan efektif, dan juga adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan Keputusan anggaran.

Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN Margabakti, peneliti melakukan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan. Informasi ini penulis dapatkan dari informan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yaitu wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, bendahara sekolah, dan guru yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Transparansi itu dilakukan mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, penggunaan, dan pengawasan terhadap dana bantuan operasional sekolah (BOS).

#### a. Transparansi dalam perencanaan dana BOS

Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan yang akan di laksanakan. SDN Margabakti membangun kepercayaan stakeholder dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya dengan memberikan informasi anggaran yang harus di bayarkan siswa pertahun. Berdasarkan penjelasan dari para narasumber, keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran sekolah kepada stakeholders internal yaitu pihak sekolah melibatkan stakeholder internal, seperti guru, komite sekolah, dan tenaga kependidikan dalam proses penyusunan rencana anggaran sekolah. Kepala sekolah juga memastikan bahwa proses penyusunan RKAS dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Masukan dan saran dari para stakeholder internal sangat dipertimbangkan dalam prioritas penggunaan anggaran sekolah.

Dalam penyusunan rencana anggaran bendahara melibatkan guru dalam proses penyusunan rencana penggunaan dana BOS dan anggaran lainnya, bendahara juga mengatakan bahwa mereka menyediakan informasi anggaran sekolah secara terbuka kepada guru dan komite sekolah kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara berkala kepada kepala sekolah dan komite sekolah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat rapat perencanaan sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dimana para guru juga dibebaskan memberikan masukan dan usulan terkait

kebutuhan pembelajaran dan pengembangan sekolah yang perlu dianggarkan dan pihak guru juga mengetahui alokasi anggaran yang digunakan.

Dari beberapa pendapat informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi dalam perencanaan dana BOS di SDN Margabakti sudah berjalan dengan cukup baik dengan terpenuhinya indikator transparansi yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dipedomani untuk Menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) dan juga adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS).

**b. Transparansi dalam pencatatan dana BOS**

Transparansi dalam pencatatan dana BOS pada SDN Margabakti bertujuan supaya stakeholder dapat percaya dengan pengelolaan dana BOS dengan adanya keterbukaan pencatatan dalam setiap kegiatan yang dibuktikan oleh adanya bukti fisik dari setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari beberapa informan seperti kepada kepala sekolah SDN Margabakti yang mengatakan bahwa beliau memastikan bahwa bendahara sekolah melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan keuangan dengan baik bahkan kepada sekolah memperbolehkan stakeholder internal untuk mengakses informasi keuangan sekolah termasuk laporan pertangungjawaban penggunaan anggaran, hal ini diikuti dengan penuturan bendahara sekolah yang mengatakan bahwa Hasil pencatatan laporan keuangan disampaikan secara berkala kepada kepala sekolah dan komite sekolah, bendahara juga menyediakan informasi keuangan bagi guru yang membutuhkan untuk kepentingan pembelajaran atau kegiatan lainnya, dimana para guru dapat mengakses informasi keuangan sekolah, seperti laporan penggunaan dana BOS dan anggaran lainnya

Dari beberapa pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa Trnsparansi dalam pencatatan Dana BOS SDN Margabakti itu sudah sesuai dengan indikator transparansi yaitu adanya akses stakeholder pada pencatatan anggaran, yang Dimana setiap pencatatan itu sudah tersedia dalam buku kas sekolah dengan disertai bukti-bukti transaksi yang dilakukan.

**c. Transparansi dalam penggunaan dana BOS**

Transparansi dalam penggunaan dana BOS pada SDN Margabakti bertujuan agar stakeholder percaya dengan pengelolaan dengan adanya akses stakeholder terhadap penggunaan anggaran yang dimana sekolah harus terbuka tentang penggunaan anggaran dan dapat diumumkan serta dipublikasikan mengenai hasil laporan anggaran. Dalam penggunaan anggaran dana BOS juga harus disesuaikan dengan rencana kegiatan anggaran sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perolehan jawaban dari beberapa informan seperti kepada kepala sekolah SDN Margabakti yang menjelaskan tentang penggunaan dana BOS, bahwa:

“Sekolah menggunakan anggaran secara transparan dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati Bersama. kepala sekolah juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengunaan anggaran kepada seluruh stakeholder internal secara berkala”.

Selanjutnya bendahara sekolah SDN Margabakti mengatakan Bahwa:

“Bendahara sekolah menyediakan bukti-bukti penggunaan anggaran seperti kuitansi, faktur atau nota kepada kepala sekolah dan komite sekolah”.

Kemudian guru SDN Margabakti juga mengatakan, bahwa:

“Guru merasa bahwa penggunaan anggaran sekolah telah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembelajaran”.

Penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan dana BOS SDN Margabakti sudah berjalan dengan cukup baik karena sudah sesuai dengan indikator. Dengan adanya kerangka kerja yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari setiap pertanggung jawaban kegiatan. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya dapat memberikan informasi anggaran dana kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran, untuk memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan khususnya pihak internal dan eksternal yaitu dengan adanya dokumen serta bukti-bukti lainnya.

Dari adanya pendapat dan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa SDN Margabakti telah memenuhi prinsip transparansi dalam penggunaan dana BOS. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta memberikan kesempatan kepada warga sekolah dalam proses pembuatan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) dengan adanya keterlibatan guru dan karyawan dalam tim manajemen BOS dalam menentukan anggaran kegiatan sekolah serta untuk proses kegiatan belajar mengajar, dan juga informasi dapat dengan mudah diketahui karena pihak sekolah telah mempublikasikan penggunaan anggaran tersebut melalui papan informasi sekolah.

d. Transparansi dalam pengawasan dana BOS

Transparansi dalam pengawasan dana BOS SDN Margabakti terdiri dari pengawasan internal sekolah dan pengawasan eksternal sekolah. Pihak internal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bersama dengan pengawas sekolah. Pengawas dari pihak eksternal sekolah adalah Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan jawaban dari beberapa informan seperti kepala sekolah SDN Margabakti yang memberikan penjelasan terkait pengawasan dana BOS :

“Kepala sekolah menyatakan bahwa sekolah memiliki auditor internal yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa penggunaan dana BOS secara berkala ”.

Selanjutnya menurut penjelasan dari bendahara sekolah SDN Margabakti yang mengatakan bahwa :

“Hasil audit disampaikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah sebagai bentuk Transparansi”.

Kemudian menurut guru SDN Margabakti yang menyatakan bahwa:

“Sekolah memiliki auditor internal yang bertugas untuk mengawasi penggunaan dana BOS, guru juga merasa bahwa kehadiran auditor internal dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah”.

Dari beberapa pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi pengawasan dana BOS di SDN Margabakti sudah sesuai dengan indikator, karena dengan adanya Lembaga audit yang independent dan efektif yang bertujuan untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Dengan adanya hasil wawancara dari informan mengenai transparansi perencanaan, pencatatan, penggunaan, dan pengawasan dana BOS, maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi pengelolaan dana BOS SDN Margabakti sudah cukup baik karena sudah memenuhi indikator pencapaian transparansi. Yang dimana dalam pembuatan rencana anggaran kegiatan sekolah yang disusun sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan sudah melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite dan guru pencatatannya disertai dengan adanya bukti-bukti yang dicatat di buku kas sekolah setiap adanya transaksi, penggunaan sudah terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, serta pengawasan dana BOS sudah diawasi oleh pihak Dinas Pendidikan yang terkait.

### **Akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS**

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sekolah pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh sekolah yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS), sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ada beberapa indikator tercapainya akuntabilitas menurut (suliyanto 2020) yaitu Pembuatan Keputusan dimana keputusan ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait, akurasi dan kelengkapan informasi yang dimana ini menjadi sangat penting untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas, kejelasan dan sasaran Sasaran kebijakan harus jelas sehingga kegiatan yang didanai dari dana BOS tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan dalam artian tidak multi tafsir, kelayakan dan konsistensi yang menjadi prioritas utama bantuan operasional sekolah (BOS) adalah untuk biaya operasional non-personil sekolah dan bukan untuk investasi atau kesejahteraan guru. Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari akuntabilitas dalam pencatatan dan akuntabilitas pelaporan dana BOS.

#### **a. Akuntabilitas dalam pencatatan dana BOS**

Akuntabilitas dalam pencatatan dana BOS itu dapat dilihat dari adanya dokumentasi dan informasi dalam pengelolaan anggaran di sekolah yang sudah diterapkan oleh SDN Margabakti, hal ini sesuai dengan penuturan kepala sekolah SDN Margabakti, yaitu:

“Dokumentasi tersebut disimpan dengan baik dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti auditor, dinas Pendidikan, atau pihak lainnya”.

Kemudian menurut bendahara sekolah SDN Margabakti mengatakan bahwa:

“Bendahara membuat dan menyimpan dengan baik semua dokumen terkait proses penganggaran seperti rencana anggaran, realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban”.

#### **b. Akuntabilitas dalam pelaporan dana BOS**

Akuntabilitas dalam pelaporan dana BOS yang dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah dibuat oleh tim manajemen BOS dan secara khusus oleh bendahara. Menurut buku petunjuk teknis BOS, laporan pertanggung jawaban kewangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester, dan tahunan. Hal ini sesuai dengan

penuturan dari kepala sekolah SDN Margabakti yang mengatakan bahwa Kepala sekolah memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan di sekolah terutama BOS, mengikuti pedoman yang ada. Laporan tersebut mencakup rincian penerimaan dan penggunaan dana BOS tiap satu triwulan, serta capaian program/kegiatan yang didanai oleh dana BOS serta peran bendahara dalam mempelajari JUKNIS pengelolaan BOS sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pembukuan dan pelaporan keuangan.

Sekolah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas harus mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta berorientasi terhadap pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. SDN Margabakti dalam menentukan sasaran dan skala prioritas yang di tetapkan di jelaskan oleh kepala sekolah bahwa Program/kegiatan yang diprioritaskan oleh sekolah adalah yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan serta mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa, diikuti dengan penjelasan bendahara sekolah bahwa dalam menentukan skala prioritas, pihak sekolah mempertimbangkan faktor biaya, manfaat dan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta mempertimbangkan sasaran dan tujuan juga dampak positif pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Dalam teori sebelumnya dipaparkan bahwa tujuan akuntabilitas adalah dapat menentukan tujuan yang tepat. Yang dimaksudkan dengan tujuan yang tepat disini adalah pemanfaatan pengelolaan dana seefektif mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan atas tujuan dari program tersebut. SDN Margabakti dalam menentukan anggaran disesuaikan dengan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini SDN Margabakti memaksimalkan pengelolaan dana untuk membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. membiayai kegiatan rapat,workshop, atau pelatihan guru dan tenaga Pendidikan. Membiayai kegiatan evaluasi pembelajaran seperti ulangan harian, UTS, dan UAS.

Sasaran kebijakan dalam pengelolaan keuangan disekolah sangat penting, yaitu untuk menetapkan tujuan dan hal yang paling penting untuk dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh bendahara sekolah SDN Margabakti yang mengatakan bahwa Bendahara Memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan pos-pos anggaran yang telah disepakati.

Prinsip akuntabilitas memberikan pertanggung jawaban yang harus disampaikan oleh para pemangku kepentingan segala kebijakan dalam pemberian informasi kebijakan pengelolaan keuangan sekolah. Dalam hal ini, Pihak sekolah menggunakan berbagai media untuk menyebarluaskan informasi laporan keuangan, seperti papan pengumuman disekolah, situs/website sekolah, dan pertemuan/rapat internal baik yang dilakukan dengan Dinas, guru, karyawan serta dengan komite sekolah dan juga wali murid.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SDN Margabakti sudah cukup baik karena sudah memenuhi indikator tercapainya akuntabilitas, yaitu dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai informasi kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan sekolah serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan Keputusan, dan juga kegiatan pelaporan untuk mempertanggung jawabkan setiap penggunaan dana sudah sesuai dengan aturan yang ada.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

Penerapan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN Margabakti sudah diterapkan, terutama dalam hal perencanaan dan pencatatan anggaran dana. SDN Margabakti telah melibatkan berbagai pihak terkait seperti guru, komite sekolah, dan tenaga kependidikan, dalam penyusunan Rencana Kegiatan anggaran Sekolah (RKAS). Ini menunjukkan bahwa upaya untuk memastikan keterbukaan informasi kepada stakeholder internal telah dilakukan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan transparansi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal keterlibatan stakeholder eksternal dan publikasi informasi secara luas.

Penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN Margabakti masih menghadapi tantangan. Walaupun pencatatan dan pelaporan dana telah dilakukan, penerapan akuntabilitas belum sepenuhnya konsisten. Masih ada kendala dalam pelaksanaan audit internal dan monitoring yang berkelanjutan, serta dalam penyampaian laporan keuangan kepada stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan dalam pengawasan dan pertanggung jawaban agar pengelolaan dana dapat lebih akuntabel.

Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat meningkatkan wawasannya agar lebih kreatif dan mempunya referensi dalam menentukan variabel yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, serta dapat lebih berani untuk melakukan penelitian pada objek penelitian yang lebih luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bratu, D. (2022). Analisis Efektivitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Dana Bos Sekolah Dalam Meningkatkan Niali Akuntabilitas laporan Pertanggungjawaban Dana Bos Di SDN 105271 Serbajadi Kecamatan Sunggal. *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Damayanti, S. E. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sdn Palebon 03 Semarang. *Fakultas Ekonomi Universitas Semarang*, 1.
- Dinata, H. S., Putrib, A. M., & Aristic, M. D. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 49–57.
- Hasdiana, U. (2018). JUMIANTI. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Intan, T. P., & Zulkarnain, Z. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 156. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8307>
- Krina, L. L. (2017). *Indikator Dan Alar Ukur Prinsip Akuntansi dan Transparans*. Salemba

# **As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal**

Volume 3 Nomor 4 (2024) 1963 – 1974 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i4.351

Empat.

- Liniarti, S., & Nasution, R. S. A. (2022). Operasional Sekolah (BOS) Dalam Madrasah Aliyah Negeri Di Kabupaten Karo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemberdataan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(6), 275–287.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). Transparasi. 1–23.
- Nodera, M. S., Kusumastuti, R., & Jumaili, S. (2023). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Merangin Tahun 2021. *Owner*, 7(1), 799–809. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1247>
- Wahinun, M. I., Supardi, S., & Isnaini, N. F. (2019). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) pada mi roudlotus salam. *Management of BOS Funds, Accountability, Transparency*, 1–14. <http://repository.unim.ac.id/id/eprint/346>
- Waluyo, T., . H., & . S. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>